

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG TIDAK MELEKATKAN SIDIK JARI PENGHADAP PADA LEMBARAN TERSENDIRI BAGIAN DARI MINUTA AKTA (Studi Notaris di Kabupaten Ciamis)

Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris. Kewajiban melekatkan sidik jari pada minuta akta sebagaimana telah dimaksud dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c tersebut tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan tentang apa saja yang harus dicantumkan dalam minuta akta, tetapi tidak menyebut sidik jari diantaranya. Dilihat dari kenyataannya, memang masih banyak juga masyarakat Indonesia yang buta huruf, yang tidak mengerti tulis baca dengan huruf latin. Dan dalam hal pengesahan suatu kesepakatan maka mereka cukup dengan melekatkan cap ibu jari tangannya/cap jempol.

Permasalahan dalam Tesis ini adalah Apakah Notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap bagian dari minuta akta mempunyai akibat hukum dalam pembuatan suatu akta otentik? dan Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi notaris di Kabupaten Ciamis yang tidak melekatkan sidik jari penghadap pada lembaran tersendiri bagian dari minuta akta?

Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Barat yaitu di Kantor Notaris di Kabupaten Ciamis. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Tanggung jawab dan Teori Kewajiban. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *juridis empiris*.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap pada lembaran tersendiri bagian dari minuta akta mempunyai akibat hukum terhadap suatu akta otentik adalah berupa penurunan kualitas kekuatan bukti akta notaris sehingga bisa dikatakan akta tersebut cacat hukum. (2) Pertanggungjawaban hukum notaris Kabupaten Ciamis dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi ini merupakan sanksi terhadap Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat Notaris. Apabila sanksi suatu peringatan tertulis kepada Notaris tidak dipatuhi atau terjadi pelanggaran oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhkan sanksi yang berikutnya secara berjenjang.

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah notaris agar lebih teliti dan cermat dalam melekatkan sidik jari penghadap pada lembaran tersendiri bagian dari minuta akta, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar dalam Rancangan Perubahan UUJN tentang pengesahan pembubuhan cap jempol dalam akta diatur secara jelas dan Majelis Pengawas Daerah harus tegas dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Notaris, Minuta Akta

ABSTRACT
LEGAL LIABILITY FOR WHICH NO NOTARY FINGERPRINT
OVERLOOKING ATTACH A SEPARATE GAZETTE PART OF THE DEED
MINUTA
(Study In District Notary Ciamis)

For Notary Liability Law. Obligations attaching fingerprints on minuta certificate as stipulated in Article 16, paragraph (1) letter c UUJN. The provisions of Article 16 paragraph (1) letter c is not in sync with the provisions of Article 1 point 8 of the Act Notary stating about what should be included in the minutes of the deed, but did not say fingerprints including. Viewed of fact, it is still many communities Indonesia illiterate, who do not understand literacy in Latin letters. And in terms of ratification of an agreement then they simply by attaching a thumbprint his / thumbprint.

The problem in this thesis is Do notaries who do not attach fingerprint face deed minuta part of a legal effect in making an authentic deed? How notary and legal accountability Ciamis district that does not attach face fingerprints on a separate sheet section of the minutes of the deed?

The study was conducted in the province of West Java, namely in the Notary Office in Ciamis. The theory used in this research is the theory of Responsibility and Liability Theory. The research method used in this study is empirical juridical approach.

The results of this study are : (1) The Legal consequences notaries who do not attach a separate sheet finger prints on the part of the minutes is the decline in the quality of evidence and the invalidity of notary deed. Notary obligation for embedding fingerprint in the minutes deed under article 16 paragraph (1) letter c UUJN is not legal action as a condition that must be met in making a decisive authentic notarial deed or the validity of a deed of notary. (2) Liability law notary Ciamis regency can be sanctioned in accordance with Article 16, paragraph (11) of Law Notary. This sanction is a sanction against a Notary relating to deed made by Notary. If the sanction of a written warning to the Notary not adhered to or violations by notary is concerned, it can be sanctioned next in stages.

Recommendations from this study is that the notary to be more thorough and meticulous in embedding fingerprints face on a sheet separate part of the minutes of the deed, the Government and Parliament of the Republic of Indonesia to the Draft Amendment UUJN on the ratification of affixing thumbprints in deed be clearly and Assembly Supervisor the area must be firm in applying the rule of law.

Keywords: Accountability Law, Notary, Minuta Deed